RESEARCH/REVIEW ARTICLE

Pengambilan Keputusan Musrenbang Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan

District Musrenbang Decision Making in South Central Timor Regency

Wehelmina Lodia Kause^a

^a Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT

*Email: kause.well@gmail.com

Naskah Diterima : 13 Desember 2019; Di-review : 22 Desember 2019; Dimuat: 30 Desember 2019

DOI :

Copyright ©FLOBAMORA 2019

Abstract

The purpose of this study is how the participatory planning decision-making process in Musrenbang in TTS Regency. Based on the purpose of this study, the qualitative approach is the right choice because it is oriented towards efforts to deepen understanding of decision making in the District Musrenbang as well as identifying factors that influence decision making in TTS districts to produce an equilibrium of technocrat and participatory planning in TTS districts. Data collection techniques with in-depth interviews/ focus discussion groups (FGD), documentary studies and online data search. The results of the assessment show that community participation through the Musrenbang as in these regulations/mandates that regional development planning is carried out based on the roles and authorities of each stakeholder to realize integration, synchronization, and synergy between stakeholders. In its implementation, the role of the community is limited to proposing programs/activities carried out through the Musrenbang at the hamlet/village level and delivered in the District Musrenbang forum. In the sub-district Musrenbang stage, the proposed program of activities is often missing or not accommodated. Musrenbang is a forum between stakeholders in agreeing on priority programs and activities through joint decision making which can be done in a participatory or technocratic way as one indicator that can determine the success of regional development.

Keywords : Decision Making, stakeholders, Musrenbang

Abstrak

Tujuan pengkajian ini adalah bagaimana proses pengambilan keputusan perencanaan partisipatif dalam Musrenbang Kecamatan di Kabupaten TTS. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka pendekatan kualitatif menjadi pilihan yang tepat karena berorientasi pada upaya pendalaman pemahaman akan pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kecamatan serta mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan di kabupaten TTS sehingga menghasilkan equilibrium perencanaan teknokrat dan partisipatif di Kabupaten TTS. Teknik pengambilan data dengan wawancara mendalam, focus discussion group (FGD), studi dokumenter dan penelusuran data online. Hasil pengkajian menunjukkan partisipasi masyarakat melalui Musrenbang sebagaimana dalam peraturan-peraturan tersebut, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing stakeholder guna mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antar pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam implementasinya, peran masyarakat hanya sebatas mengusulkan program/kegiatan yang dilakukan melalui Musrenbang di tingkat dusun/desa dan disampaikan dalam forum Musrenbang Kecamatan. Dalam tahapan Musrenbang kecamatan seringkali program kegiatan yang diusulkan hilang atau tidak diakomodir. Musrenbang merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam menyepakati program dan kegiatan prioritas melalui pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan secara partisipatif maupun teknokratis sebagai salah satu indikator yang dapat menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

Keywords: Pengambilan Keputusan, stakeholders, Musrenbang.

1. Pendahuluan

Perencanaan pembangunan daerah ditinjau dari perspektif UU Nomor 23 tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional yang dikoordinasikan, disnergikan, dan diharmonisasikan oleh Bappeda sebagai perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah harus didukung oleh data yang valid, faktual dan rekomendasi berdasarkan analisis yang aktual sehingga menghasilkan kebijakan berdasarkan hasil perencanaan, perumusan yang teknokratis. Selain itu, pentingnya perencanaan pembangunan daerah berdasarkan prakarsa sendiri dan merupakan partisipasi dalam proses perencanaan.

Perencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang merupakan salah satu bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD (kabupaten.kota) dilakukan secara berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau forum gabungan SKPD dan Kabupaten/kota.

Musrenbang merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam menyepakati program dan kegiatan prioritas melalui pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan secara partisipatif maupun teknokratis sebagai salah satu indikator yang dapat menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

Dalam Musrenbang sejatinya, adanya equilibrium perencanaan teknokrat dan partisipatif namun faktanya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang diimplementasikan dalam forum publik yang disebut Musrenbang sebagai forum pendidikan masyarakat agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten TTS selama 5 (lima) tahun terakhir justru menunjukkan hanya sebagian kecil masyarakat yang turut berpartisipasi sedangkan teknokrat lebih dominan.

Berdasarkan data yang menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan di Kabupaten TTS mengindikasikan kurangnya dukungan atau kepedulian masyarakat melakukan usulan program pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Secara konseptual, semakin tinggi kepedulian atau partisipasi masyarakat pada proses-proses perencanaan akan memberikan output yang lebih optimal. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan yang akan dicapai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan indikator utama

dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pendapat atau teori tersebut secara rasional dapat diterima, karena secara ideal tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu sangatlah pantas masyarakat terlibat di dalamnya. (Easterly dalam Sigalinting dan Warjio, 2014: 118).

Tabel 1. Prosentase Partisipasi Masyarakat dan Tekhnokrat Dalam Musrenbang Kecamatan Berdasarkan Zona

Z O N A	Tahun									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Partisipasi Masyarakat (%)	Tekhnokrat (%)	Partisipasi Masyarakat (%)	Tekhnokrat (%)	Partisipasi Masyarakat (%)	Tekhnokrat (%)	Partisipasi Masyarakat (%)	Tekhnokrat (%)	Partisipasi Masyarakat (%)	Tekhnokrat (%)
1	27	72	34	69	29	70	37	62	36	63
2	41	58	36	63	30	69	41	58	29	70
3	36	63	42	57	29	70	42	57	33	66
4	35	64	36	63	19	80	34	65	29	70
5	31	68	29	70	16	83	34	65	24	75
	53	47	77	23	93	7	16	82	49	51

Fakta empiris, pelaksanaan Musrenbang dianggap hanya sebatas “formalitas” atau sebagai alat legitimasi suatu perencanaan yang melibatkan rakyat. Menurut Mubyanto, penyebabnya adalah karena pada umumnya, setelah masuk ke pemerintah kabupaten (Dinas/SKPD), partisipasi masyarakat seringkali dikurangi. Akibatnya isi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pun lebih banyak kepentingan penguasa daripada kepentingan masyarakat. Meskipun programnya baik tetapi tidak kompatibel dengan asas manfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga tidak heran apabila masyarakat juga kurang peduli dalam mendukung program ini. Bahwa pendekatan partisipatif di dalam perencanaan melalui mekanisme Musrenbang masih menjadi retorika. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan masih didominasi oleh kebijakan kepala daerah, hasil reses DPRD, dan program SKPD. Kondisi ini pada akhirnya berimplikasi timbulnya akumulasi kekecewaan di tingkat desa dan kecamatan yang sudah memenuhi kewajiban membuat rencana Marbyanto (2008).

Implementasi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten TTS dalam melakukan integrasi antara pendekatan partisipatif dan teknokratik masih ditemukan adanya kesenjangan yang cukup besar, memerlukan adanya tindakan pengambilan keputusan yang tepat sebagai inti dari perencanaan sehingga menghasilkan equilibrium perencanaan teknokrat dan partisipatif dengan mengutamakan kebutuhan prioritas masyarakat demi pemerataan pembangunan.

Upaya pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dalam perencanaan memerlukan pengambilan keputusan sebab menurut Horold dan Donnell (1983), suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan, suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pendekatan sistematis terhadap

suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan (Siagian, 1996).

Berdasarkan latar belakang diatas, penting dilakukan suatu kajian pengambilan keputusan yang tepat dalam pelaksanaan Musrembang Kecamatan yang membutuhkan pertimbangan-pertimbangan logis dalam permasalahan perencanaan partisipatif dan teknokratis dalam pembangunan daerah untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh Kabupaten TTS dalam memecahkan masalah-masalah perencanaan pembangunan daerah dan memberikan alternative-alternatif berupa kebijakan, strataegi maupun tindakan-tindakan yang akan ditempuh.

2. Kerangka Teori

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses perumusan alternatif-alternatif yang berdasarkan data-data yang digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu kegiatan kemasyarakatan (Riyadi, dalam Fikri Azhar, 2015).

Perencanaan pembangunan merupakan suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Tjokroamidjojo, dalam Fikri Azhar, 2015).

Menurut (Anwar, 2014) mengatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan seleksi berbagai alternatif tindakan yang akan ditempuh merupakan inti perencanaan.

Menurut Smith dalam (Passele, 2013) perencanaan partisipatif mensyaratkan adanya keterlibatan individu dan kelompok yang ada di dalam masyarakat dalam membuat keputusan. Perencanaan partisipatif terdiri dari tiga aspek yaitu aspek rasional, aspek konsensual dan aspek pribadi dan social.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 Poin 21, "Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana Pembangunan Daerah. Forum Musrenbang menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dilaksanakan berdasarkan tingkatan pemerintah yang dimulai dari forum musrenbang tingkat Desa/Kampung, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi hingga musrenbang tingkat nasional (pusat). Ini dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan perencanaan pembangunan secara bottom-up, yaitu dimana masyarakat ikut terlibat melalui forum musyawarah di tingkat paling bawah yaitu desa/kelurahan dalam musrenbangkam.

Pengambilan keputusan menurut Stainer dalam (Dohu, 2018) adalah proses manusiawi yang disadari dan mencakup baik fenomena individual maupun

sosial, didasarkan pada premis nilai dan fakta menyimpulkan sebuah pilihan dari antara alternatif-alternatif dengan maksud bergerak menuju satu situasi yang diinginkan.

Pengambilan keputusan menurut Ramdani dalam (Amrozi, 2017) adalah suatu keniscayaan di dalam suatu organisasi sebagai proses komunikasi dan partisipasi yang terus menerus dari keseluruhan organisasi. Adapun kerangka pikir sebagaimana Nampak dalam gambar 1.

Gambar 1 Kerangka Pikir

3. Metode

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka pendekatan kualitatif menjadi pilihan yang tepat karena berorientasi pada upaya pendalaman pemahaman akan pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kecamatan serta mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan di kabupaten TTS dalam perencanaan teknokrat dan partisipatif di Kabupaten TTS.

Dalam pendekatan kualitatif terdapat lima strategi penelitian yaitu, fenomenologi, studi kasus, etnografi, grounded theory dan naratif menurut Creswell, 2010 dalam (Sugiyono, 2016). Strategi fenomenologi sangat cocok dengan penelitian ini karena mampu mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia mengenai fenomena tertentu sehingga didapatkan gambaran holistic dan memperbanyak pemahaman (verstehen) mengenai problematika pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kecamatan.

Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur (structural interview). Menurut (Sugiyono, 2016) wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya telah disiapkan.

Teknik pengumpulan data dengan dokumen berupa tulisan, peraturan, kebijakan, laporan-laporan, dan dokumen lainnya mendukung.

Metode analisis data menggunakan model Miles and Huberman pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2016), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :

1. Data reduction, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
2. Data display (pengajian data), dalam bentuk table dan gambar dan yang paling sering digunakan adalah teks yang berifat naratif.
3. Conclusion drawing/verification. penarikan kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengambilan data berikutnya.

4. Hasil dan Pembahasan

Proses pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan perubahan kearah yang lebih baik sebaliknya pengambilan keputusan yang salah berdampak pada roda organisasi dan administrasi. Pengkajian ini akan menggali lebih dalam tentang proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kabupaten TTS dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

4.1 Penetapan Tujuan

Pengambilan keputusan dalam Musrenbang Kecamatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah berdasarkan berbagai usulan dan aspirasi masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pembangunan daerah. Di samping itu, penyusunan RKPD juga untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari proses/mekanisme pengambilan Musrenbang yang dimulai dari tingkat desa.

Proses/mekanisme pengambilan keputusan awal dalam Musrenbang Kecamatan tidak terlepas dari penetapan tujuan dan sasaran dalam penyusunan RKPDDes ditingkat MusrenbangDes. RKPDDes sebagai dokumen perencanaan yang berkekuatan hukum dan

sebagai dasar /pedoman kegiatan atau operasionalisasi pembangunan di desa bertujuan menampung aspirasi kebutuhan masyarakat desa yang selanjutnya akan diusulkan ke Musrenbang Kecamatan. Dengan demikian pengambilan keputusan usulan program/kegiatan di tingkat Musrenbang Desa (MusrenbangDes) menjadi point penting penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan RKPD di Musrenbang Kecamatan.

Penyusunan RKPD memiliki tujuan untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian dan mensinergikan program-program prioritas pembangunan di daerah. Tujuan yang ingin dicapai dalam bentuk program/kegiatan harus sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang terintegrasi dalam RPJMD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran yang diinginkan belum sepenuhnya tercapai hal ini terlihat dari pencapaian indikator-indikator yang ditetapkan. Salah satu hasil capaian kinerja yang tidak terealisasi misalnya pada misi 2 meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dengan sasaran meningkatnya prestasi peserta pendidikan.

Bahwa tidak semua tujuan dan sasaran tercapai tentunya akan menghambat perencanaan tahun berikutnya. Program-program prioritas yang belum tercapai pada tahun sebelumnya menyebabkan tertundanya program/kegiatan prioritas lainnya yang belum dilaksanakan. Hal ini tentunya akan berdampak pada tidak terpenuhinya pemenuhan kebutuhan pelayanan publik.

4.2 Mencari Alternatif Permasalahan

Permasalahan yang sering ditemukan dalam Musrenbang adalah tidak semua desa mengajukan usulan program/kegiatan terealisasi meskipun masuk dalam skala prioritas (P1) sehingga banyak yang enggan berpartisipasi dalam Musrenbang Kecamatan. Hal tersebut dibenarkan X₁ dalam hasil wawancara berikut ini :

“kendala pertama masalah khan kita apa namanya TTS ini khan paling luas ya tigapuluh dua kecamatan ya banyak sekali sering pada saat musrenbang kami sering dikritik wah kami sudah tiga, empat, kamu P1 apalagi ini padahal tidak bisa terealisasi, tahun depan Februari musrenbang seolah-olah enggan ikut musrenbang karena sering tidak diakomodasi musrenbangnya”.

Tidak akomodirnya usulan program/kegiatan dalam Musrenbang menyebabkan masyarakat menjadi jenuh sebagaimana diungkapkan X₅ sebagai berikut :

“Masyarakat sudah menyampaikan berbagai ide dan gagasan yang berulang-ulang namun tidak terjawab dalam Musrenbang menyebabkan masyarakat menjadi jenuh”.

Menurut X₃ masyarakat sering melontarkan kalimat “usul-usul tidak dijawab P1, P1 tidak

dijawab". Jika ditelaah lebih jauh, kalimat ini sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat karena tidak terakomodirnya program/kegiatan yang diusulkan. Ketidakpuasan masyarakat berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat.

Bahwa partisipasi masyarakat dalam menentukan program /kegiatan masih lemah. Menurut (Adhanani, 2013) bahwa situasi di Indonesia secara umum mengindikasikan bahwa pihak pemerintah, sebagai pengambil keputusan, tampak kurang mempunyai komitmen yang kuat untuk menerapkan partisipasi masyarakat yang sebenarnya. Terdapat indikasi bahwa perkembangan penerapan partisipasi masyarakat dalam perencanaan berjalan lamban. Setelah 10 tahun pelaksanaan Musrenbang sebagai alat partisipatif dalam perencanaan pembangunan, inovasi yang dilakukan dalam pelaksanaannya sangat minim, terlepas dari banyaknya kritik yang diterima.

Pendapat bahwa Musrenbang hanyalah formalitas atau retorika semata karena banyak usulan yang tidak diakomodir serta dominanya teknokrat dalam Musrenbang tidaklah sejalan dengan pandangan X_1 banyak usulan yang tidak diakomodir disebabkan keterbatasan anggaran APBD. Berikut ini hasil wawancara dengan X_1 :

"tidak bisa danai semua karena pendanaan kecil misalnya kalo satu desa misalnya satu kecamatan 2 km saja sudah 5 miliar itu 32 kecamatan semua minta masalahnya permintaannya kalo kita liat di desa hanya mengarah pada infrastruktur mintanya jalan, listrik itu khan butuh dana besar tapi jarang sekali minta kegiatan-kegiatan yang bagaimana yang bisa meningkatkan pemberdayaannya dia kayaknya apa namanya bantuan apa nama bantuan mesin peralatan semua bisa terakomodir permintaan yang sulit seperti jalan. Untuk susun kegiatan dari bawah, teknokrat, sebenarnya teknokrat sudah tertuang dalam RPJMD yang juga hasil dari bawah".

Anggaran yang tidak memadai menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat penyerapan partisipasi masyarakat. Menurut (Ashari, Wahyunadi, & Hailudin, 2015) jumlah kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat selalu berbanding terbalik dengan anggaran yang tersedia. Kondisi ini tentu akan terus terjadi hingga masa-masa datang, mengingat tingkat kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Oleh sebab itu, diperlukannya sinkronisasi antara rencana pembangunan pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan Renja SKPD dengan kebutuhan masyarakat melalui forum perencanaan pembangunan, seperti Musrenbang dan forum SKPD.

Selain keterbatasan anggaran, pendekatan politik menjadi hal yang penting dalam penyusunan perencanaan daerah, sebab untuk menunjang perencanaan pembangunan yang berkelanjutan di daerah maka keberadaan RPJPD menjadi sangat

penting sebagai acuan atau *grand design* pembangunan daerah untuk jangka panjang (20 tahun).

Pada saat ini pemilihan kepala daerah disertai dengan penyampaian konsep visi dan misi calon kepala daerah dimana konsep tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam pembangunan daerah dalam jangka menengah 5 tahun. Visi dan misi kepala daerah terpilih tersebut dituangkan ke dalam RPJMD sehingga bisa dikatakan bahwa RPJMD merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Disinilah maka dikatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah juga menggunakan pendekatan politik karena menjadikan visi dan misi kepala daerah terpilih sebagai salah satu acuan.

Disisi lain, perencanaan awal di musrenbangdes mengacu pada RPJMDes sebagai penjabaran dari RPJMD yang juga memuat visi dan misi kepala desa. Inilah menjadi titik awal permasalahan perencanaan disebabkan karena masa bakti kepala daerah dan kepala desa yang tidak bersamaan berdampak pada pergeseran RPJMD dan RPJMDes pada waktu yang tidak bersamaan sehingga tidaklah mengherankan jika dalam pengusulan perencanaan tidak sinkron dengan RPJMD atau visi misi kepala daerah. Oleh karena itu, perlu penyesuaian melalui perubahan RPJMDes. RPJM Desa dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial berkepanjangan; terdapat perubahan mendasar kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.

Permendagri nomor 114 Tahun 2014 pasal 27, kepala desa mengarahkan tim melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJMDes berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Rancangan RPJMDes menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJMDes. Rancangan peraturan desa tentang RPJMDes dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJMDes. Kepala desa dapat mengubah RPJMDes dalam hal:

Pertama, terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Kedua, terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Perubahan RPJMDes dibahas dan disepakati dalam Musrenbangdes dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.

Identifikasi masalah dalam Musrenbang Kecamatan menjadi hal yang urgen dimana menurut Mitzberg, Raisinghani dan Theoret, 1976, dalam (Lahindah, 2015) identifikasi masalah terdiri dari 1) *decision recognition* dan 2) *diagnosa*. *Decision recognition* menggambarkan tahapan dimana aktor mengenali kesempatan, masalah dan krisis, sedangkan dalam tahap *diagnose* aktor berupaya

memahami stimuli dan menentukan hubungan sebab akibat dalam sebuah situasi keputusan. Respon pengambil keputusan terhadap stimuli akan tergantung pada situasi yang dihadapi. Keputusan menyangkut kesempatan biasanya terkait dengan sebuah ide, yang mungkin sudah tersimpan lama dalam pikiran sampai suatu saat si pengambil keputusan menyangkut ide tersebut. Keputusan menyangkut kesempatan biasanya disebabkan oleh stimulus tunggal yang muncul secara tiba-tiba dan memerlukan respons dan perhatian segera. Keputusan menyangkut krisis biasanya melibatkan banyak stimulus dan informasi yang kompleks. Namun sebelum seorang pengambil keputusan memutuskan untuk mengambil keputusan menyangkut masalah stimulus harus terakumulasi sampai pada tingkat tertentu yang melewati ambang batas yang ditentukan beberapa faktor, misalnya: asal sumber stimulus, ketertarikan si pengambil keputusan, persepsi manfaat dari melakukan sebuah tindakan, ketidakpastian yang terkait keputusan, serta kemungkinan sukses dari keputusan. Setelah melewati ambang batas, si pengambil keputusan akan mencoba menggunakan jalur-jalur informasi yang ada dan mencoba mengakses jalur-jalur informasi baru dalam rangka melakukan klarifikasi terhadap isu yang dihadapi.

Permasalahan yang sering ditemukan adalah usulan-usulan masyarakat dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan namun hanya keinginan. Beberapa permasalahan muncul saat proses awal melalui penyusunan RKPDes. Beberapa pihak beranggapan bahwa Kepala Desa atau pemimpin rapat tidak memiliki kompetensi sebagai pemimpin yang berdampak pada keterlambatan penyusunan RKPDes dan APBDes. Berikut hasil wawancara dengan X₅:

“ada usulan-usulan masyarakat yang tidak sesuai dengan kebutuhan alias keinginan karena masing-masing peserta rapat mempertahankan keinginan masing-masing kades atau pemimpin rapat pada akhirnya RKPDes dan APBDes mengalami keterlambatan penyusunan RKPDes dimulai pada bulan Juli pertahun namun bisa molor sampai bulan Maret tahun berikutnya selain itu masalah adanya keterlambatan pagu dana yang diinformasikan ke desa serta aparat desa yang kurang menguasai teknologi komputer”.

Pengambilan keputusan dalam penyusunan RKPDes sangat menentukan dalam pengambilan keputusan di level atas jika pagu anggaran yang diusulkan diatas 500 juta maka akan berlanjut di tingkat Musrenbang Kecamatan. Jika pengambilan keputusan dilakukan oleh Kepala Desa yang seringkali terdiri atas individu-individu maka keputusan yang dibuat kadangkala menjadi keputusan pribadi atau individu.

Jika mengacu pada pendapat Alison, 1982 dalam (Latifa, 2010) bahwa pengambil keputusan di

tingkat yang paling sederhana adalah individu. Penjelasan dari sebuah keputusan individu adalah terletak pada alasan dibuat/diambilnya sebuah keputusan, yang mencakup apa yang ingin dicapai dan bagaimana melakukannya. Disisi lain, muncul permasalahan yang terjadi adalah program yang diajukan tidak sinkron dengan RPJMD Kabupaten TTS.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam Musrenbang agar sinkron dengan RPJMD maka diperlukan pengambilan keputusan dilevel individu dan organisasi sebagaimana pendapat Allison, 1982 dalam (Latifa, 2010) bahwa model proses organisasi, lebih memfokuskan pada proses pengambilan keputusan rasional yang terjadi di tingkat individu dan organisasi. Menurut pemahaman model proses organisasi, ada perbedaan antara pengambil keputusan individu dengan organisasi. Proses pengambilan keputusan dapat berbeda karena dalam sebuah organisasi tidak ada tujuan yang tunggal dengan urutan preferensi yang disepakati, demikian pula dalam proses pengambilan keputusannya, berbeda dengan proses yang dilalui oleh individu. Model pengambilan keputusan ini cocok untuk menganalisis keputusan-keputusan yang dibuat dalam masyarakat modern sesuai dengan visi dan misi pemerintah kabupaten sebagaimana terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten TTS.

Mencari alternative permasalahan yang akan dilakukan Bappeda dalam tahapan sebatas wacana. Mencari alternative permasalahan tidak sekedar ide sebagaimana yang dikemukakan X₁ akan tetapi dasar pengambilan keputusan haruslah rasional dan factual. Pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan rasional menggunakan logika dan dapat diterima akal sehat serta tidak terlepas dari data dan informasi yang cukup akurat.

Mencari alternatif melalui wacana penganggaran yang merata disetiap wilayah merupakan salah satu alternatif yang bisa diprogramkan akan tetapi terlepas dari berapapun biaya yang akan dianggarkan, mendahuluinya itu pentingnya data dan informasi yang akurat dalam mencari alternative permasalahan.

Data dan informasi sebagai salah satu instrument yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penyusunan perencanaan daerah dapat dilakukan dengan observasi langsung di level desa pada saat MusrenbangDes yang sudah dilengkapi dengan prioritas (P1) sesuai kebutuhan wilayah tersebut. Data juga harus didukung dengan informasi yang dikomunikasikan baik secara lisan maupun tertulis. Komunikasi terkait dengan sinkronisasi program/kegiatan dengan visi dan misi.

Informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimaannya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung pada saat itu atau secara

tidak langsung pada saat mendatang Sutanta, 2011 dalam. (Aswati, Mulyani, Siagian, & Syah, 2015).

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, serta tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil analisis dan pembahasannya maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sebatas menyampaikan aspirasi hasil usulan/program kegiatan RKPDes namun tidak terlibat hingga pengambilan keputusan RKPDes Kabupaten. Adapun proses pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Musrenbang Kecamatan merupakan forum yang cenderung memenuhi aturan normatif dengan tujuan menghasilkan program prioritas berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD.
- Masih lemahnya peran Musrenbang Kecamatan untuk merealisasikan program prioritas usulan masyarakat untuk diakomodir dalam APBD.
- Penentuan skala prioritas berdasarkan nilai bobot (*score*) meliputi 5 (lima) pilar pembangunan yaitu pemerintahan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
- Penetapan pilihan program/kegiatan berdasarkan paradigma legalitas dan politis dengan merujuk pada hasil Musrenbang.
- Proses Musrenbang Kecamatan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan, aspirasi dan usulan bukan sebagai pengambil keputusan akhir.

Tindaklanjut dan pengendalian dalam bentuk monitoring dan evaluasi dengan menginventarisasi program/kegiatan tahun sebelumnya dan kegiatan yang akan datang serta melakukan penilaian hasil monitoring dan evaluasi sebagai koreksi dan penyesuaian pelaksanaan program/kegiatan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih kepada Kepala Balitbangda Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah memberikan kepercayaan dan dana untuk melakukan kajian ini.

Referensi

- Adhanani, N. A. R. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Teritorial (Studi Komparasi Bogor dan Nantes)*. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota, Volume 9(April), 355–367.
- Amrozi, Y. (2017). *Simulasi Dalam Manajemen Pengambilan Keputusan Dalam AHP* (pp. 736–746). Pekanbaru. Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/2849/ed6e6c5e124e328e1e1e58fa7b4b47c42272.pdf>
- Anwar, H. (2014). *Proses Pengambilan Keputusan Untuk Mengembangkan Mutu Madrasah*. Jurnal Pendidikan Islam, Volume 08(Nomor 01 April 2014), 40.
- Ashari, M., Wahyunadi, & Hailudin. (2015). *Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009- 2013)*. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, Volume 06, 176.
- Aswati, S., Mulyani, N., Siagian, Y., & Syah, Z. A. (2015). *Informasi, Peranan Sistem Dalam Perguruan Tinggi*. Jurnal Teknologi Dan Informasi, Volume 01(Maret 2015), 79–86.
- Dohu, T. (2018). *Strategi Komunikasi Dalam Pengambilan Keputusan Kolektif Pada Pencalonan Pilkada Kupang 2017*. Jurnal Kajian Media, Volume 2 N(Juni 2018), 30–41.
- Fikri, A. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 3 Nomor 2 (Mei-Agustus, 2015), 63-70.
- Lahindah, L. (2015). *Proses Pengambilan Keputusan Strategik Pada Usaha Kecil Menengah : Sebuah Kajian Strategis*. Finance & Accounting Journal, Volume 04(Maret-Agustus 2015), 156.
- Latifa, A. (2010). *Aplikasi Model Pengambilan Keputusan Dalam Perilaku Fertilitas*. Jurnal Kependudukan Indonesia, Volume V N(2010), 60.
- Passele, E. (2013). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Efektifitas Musrenbang Kecamatan Muara badak Kabupaten Kutai Kartanegara)*. Jurnal Paradigma, Volume 02(Nomor 01), 17.
- Sigalingging, H. A., & Warjio. (2014). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi)*. Jurnal Administrasi Publik, Volume 2(Desember 2014), 118. Retrieved from <http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/1383>
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cetakan Ke). Bandung: CV. Alfabeta

Bandung.